

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah yang selalu muncul dan krusial dalam pembangunan di negara berkembang terutama Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah sebuah permasalahan mendasar yang kompleks dan bersifat multidimensional yang artinya kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dan selanjutnya dapat dipandang dari berbagai aspek yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Di Indonesia masalah yang tak pernah hilang dan selalu muncul adalah kemiskinan dan pengangguran yang tidak dibarengi dengan tingginya peluang lapangan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah yang terus menjadi fenomenal di belahan dunia, khususnya di negara kita sendiri yaitu Indonesia yang merupakan negara berkembang. Dampak yang terjadi diakibatkan kemiskinan diantaranya membuat jutaan anak Indonesia di berbagai daerah tidak dapat mengenyam pendidikan, kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan memadai yang dikarenakan kesulitan dalam membiayai kesehatan tersebut, kurangnya tabungan dan investasi, meningkatnya angka pengangguran, dan jumlah penduduk yang tidak dapat terbendung jumlahnya disetiap tahunnya.

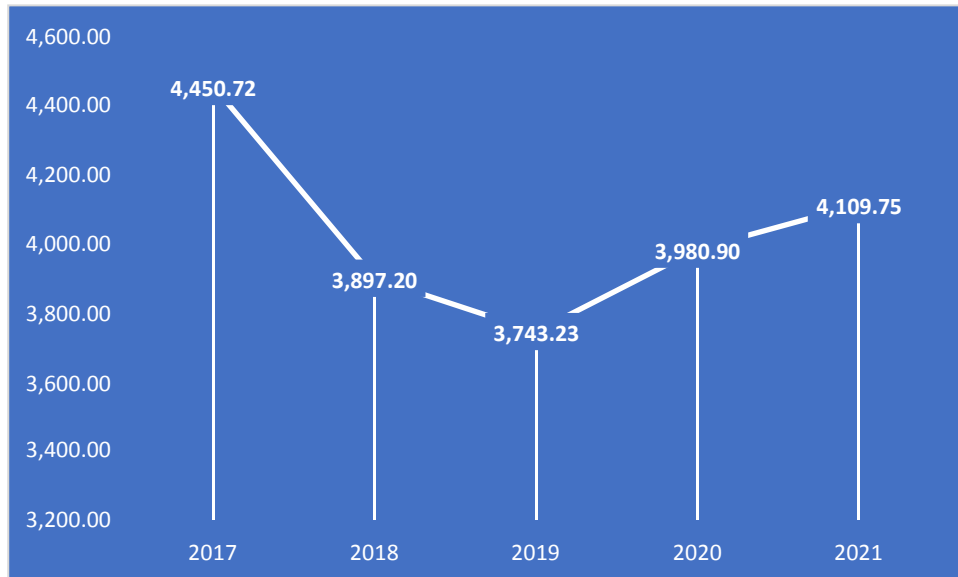
Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang penting di Indonesia, sehingga menjadi fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Kemiskinan berkaitan erat dengan keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga tidak memiliki pendapatan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat pada

umumnya tidak memadai. Masalah kemiskinan yang secara eksplisit saling berkaitan erat dan tidak bisa diatasi secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah lainnya. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan dengan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi (Susanti, 2013).

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu Provinsi yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Jumlah penduduk miskin sendiri dianggap sebagai tolak ukur yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Provinsi Jawa Tengah adalah Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di urutan ke tiga setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Jawa Tengah mencapai 37,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25,89 juta jiwa penduduk di Provinsi Jawa Tengah merupakan kelompok usia produktif yaitu usia 15-64 tahun.

Selama ini usaha pengentasan kemiskinan akan mengarah pada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, sesuai dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan diarahkan pada pembangunan daerah, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah, dengan menetapkan akar dan tujuan pembangunan nasional melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator terpenting

keberhasilan pembangunan nasional adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin. Kondisi kemiskinan Jawa Tengah menggambarkan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2).

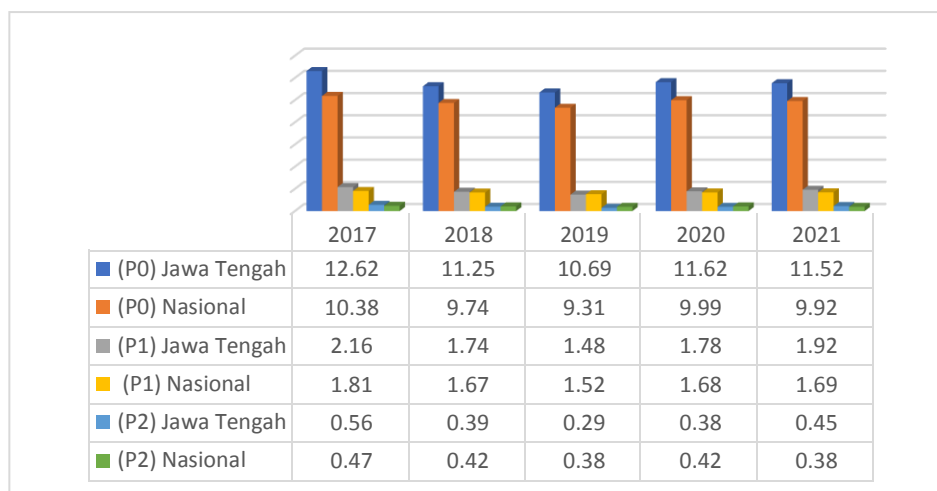


Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (Ribu Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilihat dari gambar 1.1 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir ini cenderung mengalami fluktuatif. Dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami penurunan dari 4.450.720 ribu jiwa hingga 3.743.230 ribu jiwa, tetapi pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan sebesar 3.980.900 ribu jiwa hingga 4.109.750 ribu jiwa. Hal itu pun tak luput dari faktor adanya dampak dari pandemi *Covid-19*, yang mengakibatkan banyak karyawan di perusahaan-perusahaan mengalami pengurangan karyawan. Maka

diberlakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di setiap perusahaan yang terdampak pandemi.



Gambar 1. 2 Perkembangan P0, P1, P2 Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari gambar 1.2 persentase penduduk miskin (P0) Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir kebelakang cenderung berfluktuatif dan nilainya selalu lebih besar dari persentase penduduk miskin (P0) Nasional. Itu artinya bahwa rata-rata pengeluaran perkapita perbulan penduduk di Jawa Tengah berada dibawah garis kemiskinan, yang berarti pendapatan kelompok anggota masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan jika dilihat dari Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun belakang ini peningkatannya cenderung berfluktuatif dan dominan lebih tinggi dari Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Nasional. Yang berarti dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah masih mengalami kesenjangan terhadap garis kemiskinan atau masih menghadapi permasalahan pengeluaran

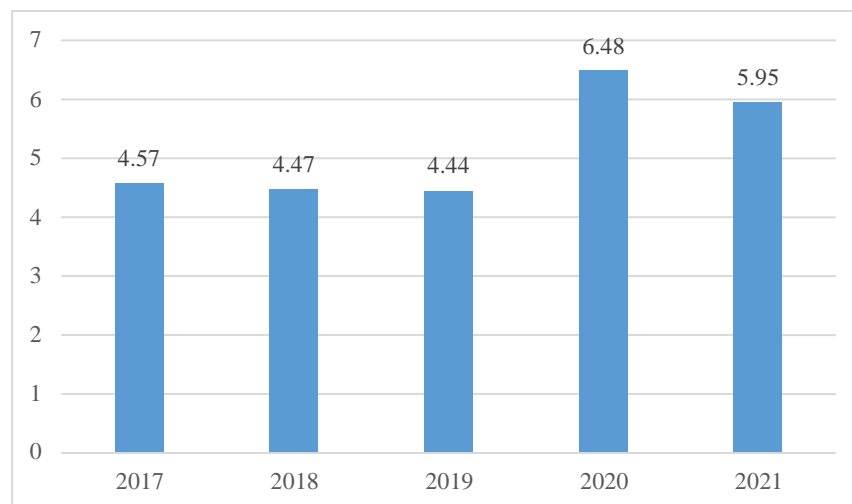
penduduk miskin yang stagnan dan pertumbuhannya yang mengalami pelambatan. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Jawa Tengah ini, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan tersebut.

Jika dilihat dari indeks keparahan kemiskinan (P2) di Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir ini masih sama dengan nilai persentase penduduk miskin (P0) dan indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang cenderung mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Ini berarti indeks keparahan kemiskinan (P2) di Jawa Tengah memberikan gambaran bahwa penyebaran pengeluaran penduduk miskin tersebut tinggi atau dengan kata lain, semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) di Jawa Tengah, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin tersebut. maka dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Tengah merupakan permasalahan dan prioritas yang penting untuk segera diselesaikan oleh pemerintah.

Fenomena ini disebabkan karena, diantaranya: 1) Terjadinya peningkatan garis kemiskinan di daerah Jawa Tengah tetapi tidak diikuti dengan peningkatan pengeluaran konsumsi kelompok masyarakat miskin; 2) Terjadinya peningkatan garis kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pengeluaran konsumsi kelompok masyarakat miskin; 3) Turunnya pengeluaran konsumsi kelompok masyarakat miskin lebih tajam dibandingkan dengan peningkatan garis kemiskinan.

Faktor selanjutnya yang sangat berpengaruh terhadap penduduk miskin adalah pengangguran. Penentuan pengukuran kemakmuran suatu masyarakat

adalah tingkat pendapatan. Pendapatan akan mencapai maksimum apabila kondisi tingkat pengangguran tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek pengurangan pendapatan masyarakat, dan hal tersebut akan mengurangi tingkat kemakmuran yang sudah tercapai. Semakin turun tingkat kemakmuran maka dapat menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.



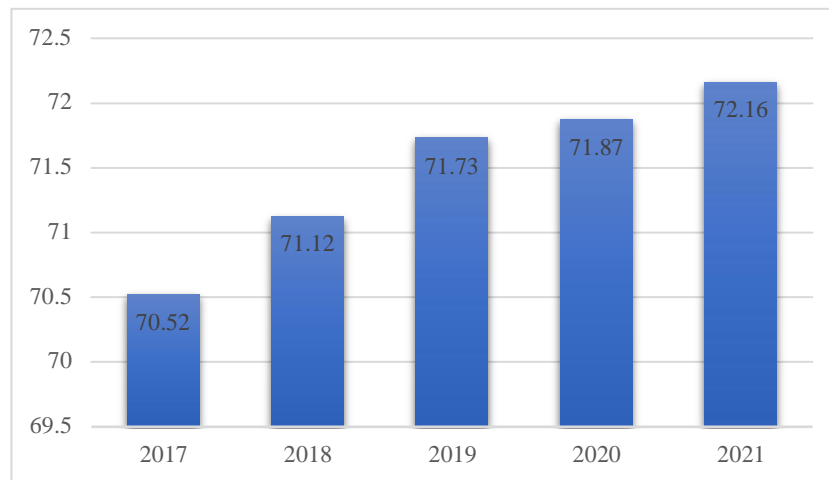
Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 (Persen)

Sumber: BPS Jawa Tengah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah pada tahun 2017 sebesar 4,57% sedangkan di tahun 2018 dan 2019 tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 4,47% menjadi 4,44% di tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebesar 6,48%, hal ini menandakan bahwa pada tahun 2020 mengalami peningkatan tingkat pengangguran di provinsi Jawa Tengah yang disebabkan oleh salah satu faktor yaitu adanya pandemi Covid-19. Dan di tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 5,95% karena adanya

pemberlakuan *new normal* sehingga, perekonomian daerah maupun nasional perlahan mulai mengalami memulih.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*), dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), serta kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur standar hidup layak seseorang dalam hal kesehatan, jika indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur standar pendidikan, sedangkan indikator kemampuan daya beli mengukur dalam standar hidup layak seseorang dalam segi ekonomi. Nilai IPM yang tinggi menandakan adanya keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dalam hal kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Pada gilirannya mampu menurunkan jumlah penduduk miskin dalam suatu daerah atau negara tersebut.



Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (Persen)

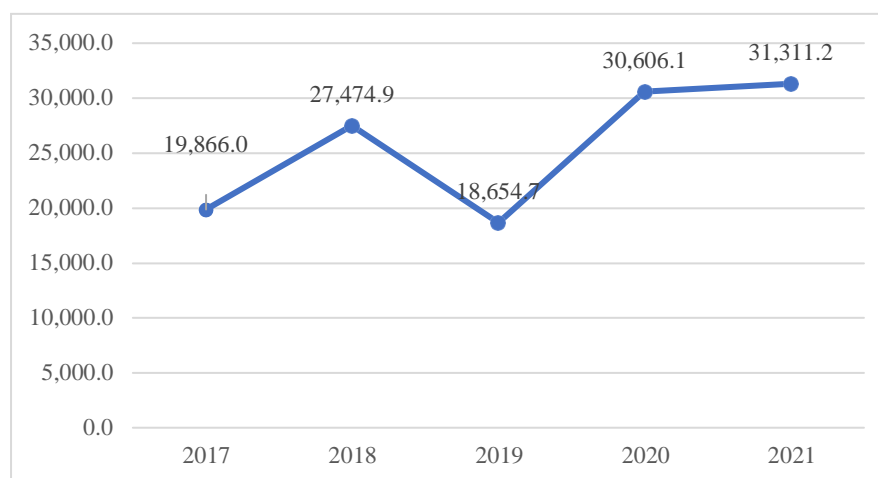
Sumber: BPS Jawa Tengah

Berdasarkan gambar di atas IPM Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2017 IPM Jawa Tengah tercatat sebesar 70,52%. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 71,12% naik sebesar 0,62 poin. Tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,61 poin menjadi 71,73. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 71,87% atau tumbuh 0,14 poin, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 yang sebesar 0,61 poin. Namun demikian, setelah satu tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Jawa Tengah, IPM mulai mengalami peningkatan di tahun 2021. Capaian IPM yang meningkat 0,29 poin di tahun 2021 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan tahun 2020 yang mengalami perlambatan akibat penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Dari beberapa hal yang sudah dijabarkan di atas, pemerintah masih perlu adanya upaya yang lebih kuat lagi untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan

ekonomi, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Selain pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai nilai dari pembangunan manusia merupakan suatu hal penting dalam pengentasan kemiskinan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin yaitu investasi atau penanaman modal, khususnya penanaman modal dalam negeri. Investasi berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi dapat mengurangi jumlah pengangguran karena penanaman modal dapat melakukan usaha di wilayah Negara Indonesia. Dengan adanya penanaman investasi terdapat kesempatan lapangan pekerjaan yang terbuka dan pekerja dapat menghasilkan pendapatan yang berakibat adanya peningkatan kesejahteraan.

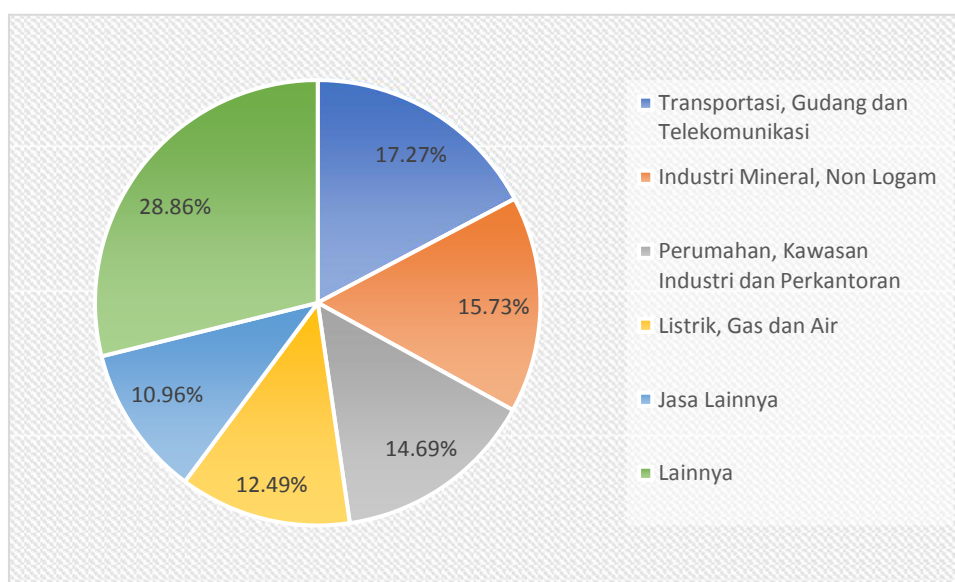


Gambar 1. 5 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Milyar Rupiah) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Jawa Barat

Jika dilihat dari gambar di atas, penanaman modal dalam negeri Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari 19.866,0 milyar rupiah menjadi 27.474,9 milyar

rupiah. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 18.654,7 milyar rupiah. Dan pada tahun 2020 hingga 2021 PMDN mengalami peningkatan menjadi sebesar 31.311,2 milyar rupiah.



Gambar 1.6 Realisasi Investasi PMDN (LKPM) Berdasarkan Sektor Tahun 2021 (Persen)

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah

Melihat dari gambar 1.6 berdasarkan laporan kegiatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, realisasi penanaman modal dalam negeri Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 31.311,2 milyar banyak disalurkan ke sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar 17,27%, urutan kedua yaitu sektor industri mineral dan non logam sebesar 15,73%. Selanjutnya yaitu pada sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar 14,69%. Pada sektor listrik, gas dan air sebesar 12,49%, pada sektor jasa lainnya sebesar 10,96%. Selanjutnya pada sektor lainnya sebesar 28,86%.

Berdasarkan penjabaran diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perkembangan dan pengaruh tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal dalam negeri terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2021. Dimana tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu bagian dari penentu keberhasilan atau tidaknya pemberantasan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal dalam negeri secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2021?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal dalam negeri secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya identifikasi permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal dalam negeri secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2021?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal dalam negeri secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2021?

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu khususnya ilmu ekonomi pembangunan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait sebagai

bahan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan yang tepat mengenai kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah

Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk mengasah pola pikir secara kritis dalam menganalisis pengaruh-pengaruh permasalahan yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat membantu pembaca dalam memahami pengaruh tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal dalam negeri terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2021, serta dapat berguna dalam mempelajari ekonomi Indonesia.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia tepatnya di Provinsi Jawa Tengah dengan mengakses *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan Jawa Tengah dalam angka.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2022/2023 pada bulan Desember 2022 sampai Januari 2023.

Adapun tabel jadwal penelitian ini sebagai berikut.

